



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, guna mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral segenap jajaran aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang secara terencana, sistematis dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
7. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. *Role Model* adalah Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Aparatur Sipil Negara yang lain.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. membangun dan mengembangkan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
- b. memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring serta evaluasi penerapan budaya kerja.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. membantu Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pegawai ASN di

lingkungan kerja masing-masing agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

- b. mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### BAB III

#### BUDAYA KERJA

##### Pasal 4

Budaya kerja merupakan suatu komitmen organisasi dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja dan hasil kerja yang baik.

##### Pasal 5

Budaya Kerja bertujuan untuk:

- a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai ASN;
- b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. mendorong peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- d. memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

### BAB IV

#### NILAI BUDAYA KERJA

##### Pasal 6

- (1) Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang meliputi Harmonis, Efektif dan Efisien, Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan yang disingkat "HEBAT".
- (2) Nilai Budaya Kerja "HEBAT" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut:

- a. Harmonis, yaitu dalam setiap perilaku, pikiran dan tindakan dalam pelaksanaan tugas selalu terpadu dan terintegrasi serta saling bekerja sama dalam mencapai Visi Misi Kabupaten Pemalang baik dengan sesama perangkat daerah/pihak terkait maupun dengan masyarakat;
- b. Efektif dan Efisien, yaitu dalam setiap perilaku, pikiran dan tindakan dalam pelaksanaan tugas selalu disesuaikan dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia;
- c. Berintegritas, yaitu dalam setiap perilaku, pikiran dan tindakan dalam pelaksanaan tugas selalu Konsisten dan berpegang teguh pada nilai-nilai prinsip dan kode etik;
- d. Akuntabel, yaitu dalam setiap perilaku, pikiran dan tindakan dalam pelaksanaan tugas selalu terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Transparan, yaitu dalam setiap perilaku, pikiran dan tindakan dalam pelaksanaan tugas selalu terbuka dalam memberikan informasi yang valid kepada masyarakat dan terbuka dalam semua tindakan dan kebijakan yang diambil.

#### Pasal 7

Perilaku penting yang mendukung penerapan Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Harmonis, meliputi kerjasama, saling menghargai dan responsif;
- b. Efektif dan Efisien, meliputi proporsional, bekerja cerdas dan tuntas serta inovatif;
- c. Berintegritas, meliputi komitmen, jujur dan disiplin;
- d. Akuntabel, meliputi taat azas dan bertanggung jawab; dan
- e. Transparan, meliputi informatif dan terbuka.

#### BAB V

#### PENERAPAN BUDAYA KERJA

#### Pasal 8

Dalam penerapan nilai dan perilaku penting budaya kerja, pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Kerja berperan sebagai panutan atau *role model*.

## Pasal 9

- (1) Untuk mendukung penerapan Nilai dan Perilaku penting Budaya Kerja, dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah /Unit Kerja.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
  - b. mengembangkan perilaku penting sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
  - c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya.
- (3) Perangkat Daerah / Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas masing-masing Perangkat Daerah / Unit Kerja.
- (4) Pembentukan dan nama KBK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## Pasal 10

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota; dan
  - e. fasilitator.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
  - a. bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan KBK;
  - b. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
  - c. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
  - d. mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
  - e. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
  - a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
  - b. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
  - c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan Penanggung jawab dan Fasilitator;

- d. bersama dengan Fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
  - e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan KBK;
  - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
  - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas :
- a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
  - b. bekerjasama dengan seluruh Anggota; dan
  - c. melaksanakan kegiatan KBK.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan KBK;
  - b. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
  - c. mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
  - d. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan Penanggung jawab;
  - e. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama Ketua melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
  - f. membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.
- (7) Bagan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:



- a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam penerapan budaya kerja;
- b. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan budaya kerja oleh Unit Kerja yang membidangi budaya kerja;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang,  
pada tanggal 30 April 2018

**BUPATI PEMALANG,**

Cap  
ttd

**JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 April 2018

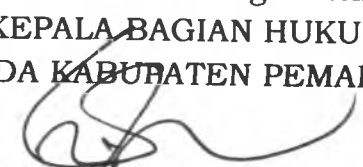
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PEMALANG,**

Cap  
ttd

**BUDHI RAHARDJO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 23**

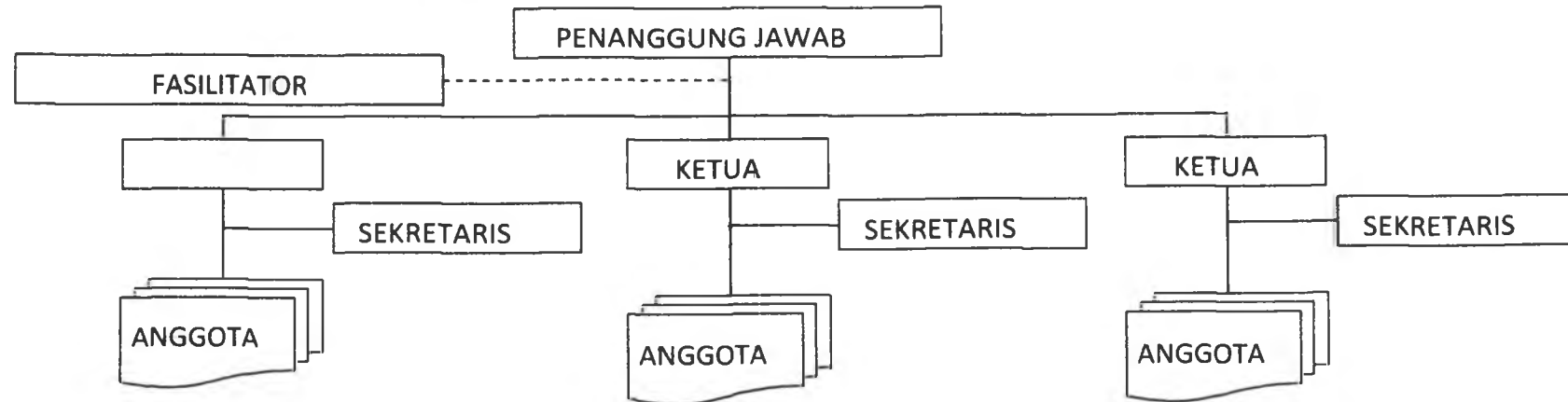
Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN PEMALANG**

  
**PUJI SUGIHARTO, SH**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAGAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA



**Keterangan:**

- = Garis komando  
----- = Garis koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI